



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id;|Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 168/B-BJ.01.01/UE/C/2026

Jakarta, 06 April 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua)

Hal : Undangan Kegiatan Forum Sinergi JF MASN 2026

Yth. 1. Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal Instansi Pusat (terlampir)
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (terlampir)
di

Tempat

Teriring rasa syukur, doa, harapan dan dukungan yang luar biasa dari Bapak/Ibu dalam Pembinaan Jabatan Fungsional bidang Manajemen ASN, kami bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Forum Sinergi JF MASN 2026: "Menata Kebutuhan, Memperkuat Karier JF MASN" secara daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 09 April 2026

Waktu : 11.45 WIB - selesai

Media : Aplikasi Zoom Meeting

Meeting ID : 949 6440 9102

Passcode : DESK09

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon Saudara menugaskan 1 (satu) orang pejabat yang membidangi kepegawaian dan 1 (satu) orang pejabat yang membidangi organisasi untuk hadir pada kegiatan dimaksud, serta menyiapkan dokumen Penetapan Persetujuan Kebutuhan JF MASN dari Menteri PAN & RB, SOTK terbaru, dan Profil (*Bezzeting*) JF MASN. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung melalui <https://s.id/LayananJFMASN>.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Deputi Bidang Pembinaan

Penyelenggaraan Manajemen ASN,

\$

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.

**Rundown Kegiatan Forum Sinergi JF MASN 2026:
“Menata Kebutuhan, Memperkuat Karier JF MASN”**

Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
11.45-12.20	Registrasi	Panitia
12.20-12.25	Pembukaan	Panitia
12.25-12.30	Memperdengarkan lagu “Indonesia Raya”	Panitia
12.30-12.35	Laporan Kegiatan	Direktur JF MASN
12.35-12.45	Pengarahan dan Pembukaan Kegiatan	Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan MASN
12.45-16.00	Penataan Kebutuhan dan Penguatan Karier JF MASN	Tim pendampingan Instansi dan PIC Instansi
16.00-16.15	Penutupan	Panitia

*) jadwal menyesuaikan

Daftar Instansi

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Gizi Nasional
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Karantina Indonesia
5. Badan Keamanan Laut RI
6. Badan Kepegawaian Negara
7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
8. Badan Narkotika Nasional
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
12. Badan Pangan Nasional
13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
14. Badan Pemeriksa Keuangan
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum
17. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
19. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
20. Badan Pusat Statistik
21. Badan Riset dan Inovasi Nasional
22. Badan Siber dan Sandi Negara
23. Badan Standardisasi Nasional
24. Kejaksaan Republik Indonesia
25. Kementerian Agama
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
28. Kementerian Dalam Negeri
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
31. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Kementerian Hak Asasi Manusia
33. Kementerian Hukum
34. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
35. Kementerian Imigrasi dan Pemasaran
36. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Kementerian Kebudayaan
38. Kementerian Kehutanan
39. Kementerian Kelautan dan Perikanan
40. Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
41. Kementerian Kesehatan
42. Kementerian Ketenagakerjaan
43. Kementerian Keuangan

44. Kementerian Komunikasi dan Digital
45. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
46. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
47. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
50. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
51. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
52. Kementerian Koperasi
53. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
55. Kementerian Luar Negeri
56. Kementerian Pariwisata
57. Kementerian Pekerjaan Umum
58. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
59. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
60. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
61. Kementerian Pemuda dan Olahraga
62. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
64. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
65. Kementerian Perdagangan
66. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
67. Kementerian Perhubungan
68. Kementerian Perindustrian
69. Kementerian Pertahanan
70. Kementerian Pertanian
71. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
72. Kementerian Sekretariat Negara
73. Kementerian Sosial
74. Kementerian Transmigrasi
75. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
76. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
77. Kepolisian Negara
78. Komisi Pemberantasan Korupsi
79. Lembaga Administrasi Negara
80. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
81. Lembaga Ketahanan Nasional RI
82. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
85. Mahkamah Agung RI
86. Ombudsman Republik Indonesia
87. Otorita Ibu Kota Nusantara
88. Pemerintah Aceh
89. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

90. Pemerintah Kab. Aceh Barat
91. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
92. Pemerintah Kab. Aceh Besar
93. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
94. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
95. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
96. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
97. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
98. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
99. Pemerintah Kab. Aceh Timur
100. Pemerintah Kab. Aceh Utara
101. Pemerintah Kab. Agam
102. Pemerintah Kab. Alor
103. Pemerintah Kab. Asahan
104. Pemerintah Kab. Asmat
105. Pemerintah Kab. Badung
106. Pemerintah Kab. Balangan
107. Pemerintah Kab. Bandung
108. Pemerintah Kab. Bandung Barat
109. Pemerintah Kab. Banggai
110. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
111. Pemerintah Kab. Banggai Laut
112. Pemerintah Kab. Bangka
113. Pemerintah Kab. Bangka Barat
114. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
115. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
116. Pemerintah Kab. Bangkalan
117. Pemerintah Kab. Bangli
118. Pemerintah Kab. Banjar
119. Pemerintah Kab. Banjarnegara
120. Pemerintah Kab. Bantaeng
121. Pemerintah Kab. Bantul
122. Pemerintah Kab. Banyuasin
123. Pemerintah Kab. Banyumas
124. Pemerintah Kab. Banyuwangi
125. Pemerintah Kab. Barito Kuala
126. Pemerintah Kab. Barito Selatan
127. Pemerintah Kab. Barito Timur
128. Pemerintah Kab. Barito Utara
129. Pemerintah Kab. Barru
130. Pemerintah Kab. Batang
131. Pemerintah Kab. Batang Hari
132. Pemerintah Kab. Batu Bara
133. Pemerintah Kab. Bekasi
134. Pemerintah Kab. Belitung
135. Pemerintah Kab. Belitung Timur
136. Pemerintah Kab. Belu

137. Pemerintah Kab. Bener Meriah
138. Pemerintah Kab. Bengkalis
139. Pemerintah Kab. Bengkayang
140. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
141. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
142. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
143. Pemerintah Kab. Berau
144. Pemerintah Kab. Bima
145. Pemerintah Kab. Bintan
146. Pemerintah Kab. Bireuen
147. Pemerintah Kab. Blitar
148. Pemerintah Kab. Blora
149. Pemerintah Kab. Boalemo
150. Pemerintah Kab. Bogor
151. Pemerintah Kab. Bojonegoro
152. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
153. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
154. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
155. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
156. Pemerintah Kab. Bombana
157. Pemerintah Kab. Bondowoso
158. Pemerintah Kab. Bone
159. Pemerintah Kab. Bone Bolango
160. Pemerintah Kab. Boven Digoel
161. Pemerintah Kab. Boyolali
162. Pemerintah Kab. Brebes
163. Pemerintah Kab. Buleleng
164. Pemerintah Kab. Bulukumba
165. Pemerintah Kab. Bulungan
166. Pemerintah Kab. Bungo
167. Pemerintah Kab. Buol
168. Pemerintah Kab. Buru
169. Pemerintah Kab. Buru Selatan
170. Pemerintah Kab. Buton
171. Pemerintah Kab. Buton Selatan
172. Pemerintah Kab. Buton Tengah
173. Pemerintah Kab. Buton Utara
174. Pemerintah Kab. Ciamis
175. Pemerintah Kab. Cianjur
176. Pemerintah Kab. Cilacap
177. Pemerintah Kab. Cirebon
178. Pemerintah Kab. Daiiri
179. Pemerintah Kab. Deiyai
180. Pemerintah Kab. Deli Serdang
181. Pemerintah Kab. Demak
182. Pemerintah Kab. Dharmasraya
183. Pemerintah Kab. Dogiyai

184. Pemerintah Kab. Dompu
185. Pemerintah Kab. Donggala
186. Pemerintah Kab. Empat Lawang
187. Pemerintah Kab. Ende
188. Pemerintah Kab. Enrekang
189. Pemerintah Kab. Fak-Fak
190. Pemerintah Kab. Flores Timur
191. Pemerintah Kab. Garut
192. Pemerintah Kab. Gayo Lues
193. Pemerintah Kab. Gianyar
194. Pemerintah Kab. Gorontalo
195. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
196. Pemerintah Kab. Gowa
197. Pemerintah Kab. Gresik
198. Pemerintah Kab. Grobogan
199. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
200. Pemerintah Kab. Gunung Mas
201. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
202. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
203. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
204. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
205. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
206. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
207. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
208. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
209. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
210. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
211. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
212. Pemerintah Kab. Indramayu
213. Pemerintah Kab. Intan Jaya
214. Pemerintah Kab. Jayapura
215. Pemerintah Kab. Jember
216. Pemerintah Kab. Jembrana
217. Pemerintah Kab. Jeneponto
218. Pemerintah Kab. Jepara
219. Pemerintah Kab. Jombang
220. Pemerintah Kab. Kampar
221. Pemerintah Kab. Kapuas
222. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
223. Pemerintah Kab. Karanganyar
224. Pemerintah Kab. Karangasem
225. Pemerintah Kab. Karawang
226. Pemerintah Kab. Karimun
227. Pemerintah Kab. Katingan
228. Pemerintah Kab. Kaur
229. Pemerintah Kab. Kayong Utara
230. Pemerintah Kab. Kebumen

231. Pemerintah Kab. Kediri
232. Pemerintah Kab. Keerom
233. Pemerintah Kab. Kendal
234. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
235. Pemerintah Kab. Kepahiang
236. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
237. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
238. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
239. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
240. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
241. Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
242. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
243. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
244. Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
245. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
246. Pemerintah Kab. Kerinci
247. Pemerintah Kab. Ketapang
248. Pemerintah Kab. Klaten
249. Pemerintah Kab. Klungkung
250. Pemerintah Kab. Kolaka
251. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
252. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
253. Pemerintah Kab. Konawe
254. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
255. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
256. Pemerintah Kab. Konawe Utara
257. Pemerintah Kab. Kotabaru
258. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
259. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
260. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
261. Pemerintah Kab. Kubu Raya
262. Pemerintah Kab. Kudus
263. Pemerintah Kab. Kulon Progo
264. Pemerintah Kab. Kuningan
265. Pemerintah Kab. Kupang
266. Pemerintah Kab. Kutai Barat
267. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
268. Pemerintah Kab. Kutai Timur
269. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
270. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
271. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
272. Pemerintah Kab. Lahat
273. Pemerintah Kab. Lamandau
274. Pemerintah Kab. Lamongan
275. Pemerintah Kab. Lampung Barat
276. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
277. Pemerintah Kab. Lampung Tengah

278. Pemerintah Kab. Lampung Timur
279. Pemerintah Kab. Lampung Utara
280. Pemerintah Kab. Landak
281. Pemerintah Kab. Langkat
282. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
283. Pemerintah Kab. Lebak
284. Pemerintah Kab. Lebong
285. Pemerintah Kab. Lembata
286. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
287. Pemerintah Kab. Lingga
288. Pemerintah Kab. Lombok Barat
289. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
290. Pemerintah Kab. Lombok Timur
291. Pemerintah Kab. Lombok Utara
292. Pemerintah Kab. Lumajang
293. Pemerintah Kab. Luwu
294. Pemerintah Kab. Luwu Timur
295. Pemerintah Kab. Luwu Utara
296. Pemerintah Kab. Madiun
297. Pemerintah Kab. Magelang
298. Pemerintah Kab. Magetan
299. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
300. Pemerintah Kab. Majalengka
301. Pemerintah Kab. Majene
302. Pemerintah Kab. Malaka
303. Pemerintah Kab. Malang
304. Pemerintah Kab. Malinau
305. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
306. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
307. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
308. Pemerintah Kab. Mamasa
309. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
310. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
311. Pemerintah Kab. Mamuju
312. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
313. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
314. Pemerintah Kab. Manggarai
315. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
316. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
317. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
318. Pemerintah Kab. Mappi
319. Pemerintah Kab. Maros
320. Pemerintah Kab. Maybrat
321. Pemerintah Kab. Melawi
322. Pemerintah Kab. Mempawah
323. Pemerintah Kab. Merangin
324. Pemerintah Kab. Merauke

325. Pemerintah Kab. Mesuji
326. Pemerintah Kab. Mimika
327. Pemerintah Kab. Minahasa
328. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
329. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
330. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
331. Pemerintah Kab. Mojokerto
332. Pemerintah Kab. Morowali
333. Pemerintah Kab. Morowali Utara
334. Pemerintah Kab. Muara Enim
335. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
336. Pemerintah Kab. Mukomuko
337. Pemerintah Kab. Muna
338. Pemerintah Kab. Muna Barat
339. Pemerintah Kab. Murung Raya
340. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
341. Pemerintah Kab. Musi Rawas
342. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
343. Pemerintah Kab. Nabire
344. Pemerintah Kab. Nagan Raya
345. Pemerintah Kab. Nagekeo
346. Pemerintah Kab. Natuna
347. Pemerintah Kab. Nduga
348. Pemerintah Kab. Ngada
349. Pemerintah Kab. Nganjuk
350. Pemerintah Kab. Ngawi
351. Pemerintah Kab. Nias
352. Pemerintah Kab. Nias Barat
353. Pemerintah Kab. Nias Selatan
354. Pemerintah Kab. Nias Utara
355. Pemerintah Kab. Nunukan
356. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
357. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
358. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
359. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
360. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
361. Pemerintah Kab. Pacitan
362. Pemerintah Kab. Padang Lawas
363. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
364. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
365. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
366. Pemerintah Kab. Pamekasan
367. Pemerintah Kab. Pandeglang
368. Pemerintah Kab. Pangandaran
369. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
370. Pemerintah Kab. Paniai
371. Pemerintah Kab. Parigi Moutong

372. Pemerintah Kab. Pasaman
373. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
374. Pemerintah Kab. Pasangkayu
375. Pemerintah Kab. Paser
376. Pemerintah Kab. Pasuruan
377. Pemerintah Kab. Pati
378. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
379. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
380. Pemerintah Kab. Pekalongan
381. Pemerintah Kab. Pelalawan
382. Pemerintah Kab. Pemalang
383. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
384. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
385. Pemerintah Kab. Pesawaran
386. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
387. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
388. Pemerintah Kab. Pidie
389. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
390. Pemerintah Kab. Pinrang
391. Pemerintah Kab. Pohuwato
392. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
393. Pemerintah Kab. Ponorogo
394. Pemerintah Kab. Poso
395. Pemerintah Kab. Pringsewu
396. Pemerintah Kab. Probolinggo
397. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
398. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
399. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
400. Pemerintah Kab. Puncak
401. Pemerintah Kab. Purbalingga
402. Pemerintah Kab. Purwakarta
403. Pemerintah Kab. Purworejo
404. Pemerintah Kab. Raja Ampat
405. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
406. Pemerintah Kab. Rembang
407. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
408. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
409. Pemerintah Kab. Rote Ndao
410. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
411. Pemerintah Kab. Sambas
412. Pemerintah Kab. Samosir
413. Pemerintah Kab. Sampang
414. Pemerintah Kab. Sanggau
415. Pemerintah Kab. Sarolangun
416. Pemerintah Kab. Sekadau
417. Pemerintah Kab. Seluma
418. Pemerintah Kab. Semarang

419. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
420. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
421. Pemerintah Kab. Serang
422. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
423. Pemerintah Kab. Seruyan
424. Pemerintah Kab. Siak
425. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
426. Pemerintah Kab. Sidoarjo
427. Pemerintah Kab. Sigi
428. Pemerintah Kab. Sijunjung
429. Pemerintah Kab. Sikka
430. Pemerintah Kab. Simalungun
431. Pemerintah Kab. Simeulue
432. Pemerintah Kab. Sinjai
433. Pemerintah Kab. Sintang
434. Pemerintah Kab. Situbondo
435. Pemerintah Kab. Sleman
436. Pemerintah Kab. Solok
437. Pemerintah Kab. Solok Selatan
438. Pemerintah Kab. Soppeng
439. Pemerintah Kab. Sorong
440. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
441. Pemerintah Kab. Sragen
442. Pemerintah Kab. Subang
443. Pemerintah Kab. Sukabumi
444. Pemerintah Kab. Sukamara
445. Pemerintah Kab. Sukoharjo
446. Pemerintah Kab. Sumba Barat
447. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
448. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
449. Pemerintah Kab. Sumba Timur
450. Pemerintah Kab. Sumbawa
451. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
452. Pemerintah Kab. Sumedang
453. Pemerintah Kab. Sumenep
454. Pemerintah Kab. Supiori
455. Pemerintah Kab. Tabalong
456. Pemerintah Kab. Tabanan
457. Pemerintah Kab. Takalar
458. Pemerintah Kab. Tana Tidung
459. Pemerintah Kab. Tana Toraja
460. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
461. Pemerintah Kab. Tanah Datar
462. Pemerintah Kab. Tanah Laut
463. Pemerintah Kab. Tangerang
464. Pemerintah Kab. Tanggamus
465. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

466. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
467. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
468. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
469. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
470. Pemerintah Kab. Tapin
471. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
472. Pemerintah Kab. Tebo
473. Pemerintah Kab. Tegal
474. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
475. Pemerintah Kab. Teluk Wondama
476. Pemerintah Kab. Temanggung
477. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
478. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
479. Pemerintah Kab. Toba
480. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
481. Pemerintah Kab. Tolitoli
482. Pemerintah Kab. Toraja Utara
483. Pemerintah Kab. Trenggalek
484. Pemerintah Kab. Tuban
485. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
486. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
487. Pemerintah Kab. Tulungagung
488. Pemerintah Kab. Wajo
489. Pemerintah Kab. Wakatobi
490. Pemerintah Kab. Waropen
491. Pemerintah Kab. Way Kanan
492. Pemerintah Kab. Wonogiri
493. Pemerintah Kab. Wonosobo
494. Pemerintah Kab. Yahukimo
495. Pemerintah Kab. Yalimo
496. Pemerintah Kota Ambon
497. Pemerintah Kota Balikpapan
498. Pemerintah Kota Banda Aceh
499. Pemerintah Kota Bandar Lampung
500. Pemerintah Kota Bandung
501. Pemerintah Kota Banjar
502. Pemerintah Kota Banjarbaru
503. Pemerintah Kota Banjarmasin
504. Pemerintah Kota Batam
505. Pemerintah Kota Batu
506. Pemerintah Kota Baubau
507. Pemerintah Kota Bekasi
508. Pemerintah Kota Bengkulu
509. Pemerintah Kota Bima
510. Pemerintah Kota Binjai
511. Pemerintah Kota Bitung
512. Pemerintah Kota Blitar

513. Pemerintah Kota Bogor
514. Pemerintah Kota Bontang
515. Pemerintah Kota Bukittinggi
516. Pemerintah Kota Cilegon
517. Pemerintah Kota Cimahi
518. Pemerintah Kota Cirebon
519. Pemerintah Kota Denpasar
520. Pemerintah Kota Depok
521. Pemerintah Kota Dumai
522. Pemerintah Kota Gorontalo
523. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
524. Pemerintah Kota Jambi
525. Pemerintah Kota Jayapura
526. Pemerintah Kota Kediri
527. Pemerintah Kota Kendari
528. Pemerintah Kota Kotamobagu
529. Pemerintah Kota Kupang
530. Pemerintah Kota Langsa
531. Pemerintah Kota Lhokseumawe
532. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
533. Pemerintah Kota Madiun
534. Pemerintah Kota Magelang
535. Pemerintah Kota Makassar
536. Pemerintah Kota Malang
537. Pemerintah Kota Manado
538. Pemerintah Kota Mataram
539. Pemerintah Kota Medan
540. Pemerintah Kota Metro
541. Pemerintah Kota Mojokerto
542. Pemerintah Kota Padang
543. Pemerintah Kota Padang Panjang
544. Pemerintah Kota Padangsidempuan
545. Pemerintah Kota Pagar Alam
546. Pemerintah Kota Palangka Raya
547. Pemerintah Kota Palembang
548. Pemerintah Kota Palopo
549. Pemerintah Kota Palu
550. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
551. Pemerintah Kota Parepare
552. Pemerintah Kota Pariaman
553. Pemerintah Kota Pasuruan
554. Pemerintah Kota Payakumbuh
555. Pemerintah Kota Pekalongan
556. Pemerintah Kota Pekanbaru
557. Pemerintah Kota Pematangsiantar
558. Pemerintah Kota Pontianak
559. Pemerintah Kota Prabumulih

560. Pemerintah Kota Probolinggo
561. Pemerintah Kota Sabang
562. Pemerintah Kota Salatiga
563. Pemerintah Kota Samarinda
564. Pemerintah Kota Sawahlunto
565. Pemerintah Kota Semarang
566. Pemerintah Kota Serang
567. Pemerintah Kota Sibolga
568. Pemerintah Kota Singkawang
569. Pemerintah Kota Solok
570. Pemerintah Kota Sorong
571. Pemerintah Kota Subulussalam
572. Pemerintah Kota Sukabumi
573. Pemerintah Kota Sungai Penuh
574. Pemerintah Kota Surabaya
575. Pemerintah Kota Surakarta
576. Pemerintah Kota Tangerang
577. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
578. Pemerintah Kota Tanjungbalai
579. Pemerintah Kota Tanjungpinang
580. Pemerintah Kota Tarakan
581. Pemerintah Kota Tasikmalaya
582. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
583. Pemerintah Kota Tegal
584. Pemerintah Kota Ternate
585. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
586. Pemerintah Kota Tomohon
587. Pemerintah Kota Tual
588. Pemerintah Kota Yogyakarta
589. Pemerintah Provinsi Bali
590. Pemerintah Provinsi Banten
591. Pemerintah Provinsi Bengkulu
592. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
593. Pemerintah Provinsi Gorontalo
594. Pemerintah Provinsi Jambi
595. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
596. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
597. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
598. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
599. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
600. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
601. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
602. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
603. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
604. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
605. Pemerintah Provinsi Lampung
606. Pemerintah Provinsi Maluku

607. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
608. Pemerintah Provinsi NTT
609. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
610. Pemerintah Provinsi Papua
611. Pemerintah Provinsi Papua Barat
612. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
613. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
614. Pemerintah Provinsi Riau
615. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
616. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
617. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
618. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
619. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
620. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
621. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
622. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
623. Perpustakaan Nasional RI
624. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
625. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
626. Sekretariat Jenderal DPR RI
627. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
628. Sekretariat Jenderal MPR
629. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
630. Setjen Komisi Pemilihan Umum
631. Setjen KOMNAS HAM

